



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
UNIT KERJA : PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARI ASMOKO**
2. Jabatan : **EXECUTIVE VICE PRESIDENT DIVISI SIPIL UMUM**
3. NHK : **655899**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.100.318.786

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m²/160 m² di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 2600 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Bangunan Seluas 42 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m²/210 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Bangunan Seluas 32 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 264.066.000
6. Bangunan Seluas 29 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 255.263.800
7. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/51 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 880.988.986
8. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m²/270 m² di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/126 m² di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 430.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 217.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.647.092.954
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.394.411.740
III. HUTANG	Rp.	25.028.773
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.369.382.967

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.